KEBIJAKAN PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO DALAM PENGALIHAN SUBSIDI DAN PENENTUAN HARGA BBM YANG MENGACU PADA MEKANISME PASAR (PERSPEKTIF SIYASAH)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

FISSILMI KAFFAH
NIM: 11370080

PEMBIMBING:
DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG
NIP. 19681020 199803 1 002

SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015

ABSTRAK

Pada dasarnya kebijakan adalah *a means to an end,* alat untuk mencapai sebuah tujuan. Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian tujuan publik. Artinya kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Proses kebijakan harus mampu membantu para pembuat kebijakan merumuskan tujuan-tujuannya. Sebuah kebijakan tanpa tujuan tidak memiliki arti, bahkan tidak mustahil akan menimbulkan masalah baru.

Kebijakan pemerintah terhadap pengalihan subsidi BBM ini sangat berpengarauh terhadap berbagai bidang seperti halnya berpengaruh secara politik. Penelitian skripsi yang berjudul "Kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo Dalam Penghapusan Subsidi dan Penentuan Harga BBM Yang Mengacu Pada Mekanisme Pasar" merupakan penelitian yang menggunakan kerangka teori siyasah. Data yang penulis peroleh dianalisis melalui teori kebijakan publik dengan pendekatan prinsip-prinsip dalam siyasah syar'iyah yang mengacu pada 5 (lima) indikator, yaitu sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam, persamaan didepan hukum dan pemerintah, tidak memberatkan masyarakat yang melaksanakannya, menciptakan rasa keadilan, dan menciptakan kemaslahatan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui potensi keberhasilan dan kegagalan kebijakan pengalihan subsidi BBM yang bertujuan untuk kesejahteraan yang lebih menyeluruh bagi rakyat Indonesia.

Layanan energi merupakan salah satu syarat dasar pemenuhan kebutuhan hidup yang berkualitas. Energi dan layanannya memainkan peranan sangat penting dalam pembangunan negara, termasuk Indonesia.Layanan energi perlu ditopang oleh suatu sistem yang berkelanjutan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa selama ini alokasi untuk subsidi energi khususnya BBM sudah sangat besar bahkan melampaui anggaran pembangunan infrastuktur, kesehatan dan pendidikan. Kebijakan pengalihan subsidi ini merupakan langkah yang tepat. Dapat dikatakan tepat karena kebijakan ini adalah sebagai wujud dari amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pada alinea keempat..." *melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa...*". Kebijakan ini juga menyangkut ketahanan nasional dalam hal ini meliputi ketahanan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, kebijakan ini telah relevan dengan tujuan dibuatnya suatu kebijakan dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam siyasah karena dalam jangka panjang jika kebijakan ini benar-benar dilakukan dengan baik dan bertujuan untuk kemaslahatan seluruh rakyat.

Namun, pemerintah juga haus menyiapkan langkahlain dalam pelaksanaan kebijakan ini. Misalnya harus ada transparansi pemerintah dalam pengelolaan alokasi anggaran subsidi sehingga berdampak pada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui alokasi anggaran subsidi ini dalam jangka panjang. Dalam politik pun suatu kebijakan pasti menimbulkan pro dan kontra dalam hal ini antara DPR dan Pemerintah belum sepenuhnya sejalan. Bisa jadi hal tersebut sangatlah mempengaruhi tujuan realokasi subsidi BBM ini.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Fissilmi Kaffah
NIM	: 11370080
Jurusan	: Siyasah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 September 2015 M
15 Dzulhijah 1436 H

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
D3784ADF376373949
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Fissilmi Kaffah
NIM. 11370080

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Fissilmi Kaffah
Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.
Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Fissilmi Kaffah
NIM : 11370080
Judul :**"Kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Pengalihan Subsidi dan Penentuan Harga BBM yang Mengacu Pada Mekanisme Pasar (Perspektif Siyasah)"**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikun wr.wb.

Yogyakarta, 28 September 2015 M
15 Dzulhijah 1436 H

Pembimbing,

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag
NIP. 19681020 199803 1 002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adi Sucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0551/2015

Tugas Akhir dengan judul :KEBIJAKAN PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO DALAM PENGALIHAN SUBSIDI DAN PENENTUAN HARGA BBM YANG MENGACU PADA MEKANISME PASAR (PERSPEKTIF SIYASAH)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Fissilmi Kaffah
Nomor Induk Mahasiswa : 1130080
Telah diujikan pada : Rabu, 11 November 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : 90 (A-)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syar'ah dan Hukum uin Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji I

Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag
NIP. 19620327 199203 1 001

Penguji II

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.
NIP. 19750517 200501 1 004

Yogyakarta, 11 November 2015
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Ṡa’	Ṡ	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa’	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet dengan titik di atas
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es-ye
ص	Ṣād	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de dengan titik di bawah

ط	Ṭa’	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa’	Ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ya

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ-------	Fathah	A	A
◌ِ-------	Kasrah	I	I
◌ُ-------	Dammah	U	U

Contoh:

كتب ⟶ kataba سئل ⟶ su'ila

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fatkhah dan ya	Ai	a - i
وَ	Fatkhah dan wau	Au	a - u

3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fatkhah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
يَ	Fatkhah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
وُ	Zammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال ⟶ *qāla* قيل ⟶ *qīla*

رمى ⟶ *ramā* يقول ⟶ *yaqūlu*

C. Ta' Marbuṭah

1. Transliterasi *ta'* marbuṭah hidup

   Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah "t".

2. Transliterasi *ta'* marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh:

طلحة ⟶ *ṭalḥah*

3. Jika ta' marbuṭah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al-", dan bacaannya terpisah, maka ta' marbuṭah tersebut ditransliterasikan dengan "ha"/h.

Contoh:

روضة الأطفال ⟶ *rauḍah al-aṭfāl*

المدينة المنورة ⟶ *al-Madīnah al-Munawwarah*

D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نزّل ⟶ *nazzala*

البرّ ⟶ *al-birru*

E. Kata Sandang "ال"

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu "ال". Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang

yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "ل" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

   Contoh:

   الرّجل ⟶ *ar-rajulu*

   السّيدة ⟶ *as-sayyidatu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

   Contoh:

   القلم ⟶ *al-qalamu*

   البديع ⟶ *al-badī'u*

F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء ⟶ *syai'un*

امرت ⟶ *umirtu*

النوء ⟶ *an-nau'u*

G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول ⟶ *Wamā Muhammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

MOTTO

Lebih Baik Merasakan Sulitnya Pendidikan Sekarang

Daripada Merasakan Pahitnya Kebodohan Kelak

"KECERDASAN BUKANLAH TOLAK UKUR KESUKSESAN,

TETAPI DENGAN MENJADI CERDAS KITA BISA MENGGAPAI

KESUKSESAN"

HALAMAN PERSEMBAHAN

بسم الرحمن الرحيم

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan mengucap syukur alhamdulillah saya persembahkan skripsi ini untuk :

- **Ayahanda dan Ibundaku tercinta, terima kasih atas limpahan do'a dankasih sayang yang tak terhingga, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarkanku sampai saat ini, motivator terbesar dalam hidupku untuk selalu menjadi lebih baik lagi, tak pernah cukup aku membalas cinta kasih Ayah-Ibu padaku.**
- **Kakak-kakak dan Adik tercinta, yang selalu mendukung, mendoakan serta memotivasiku untuk terus melangkah lebih baik.**
- **Dosen-dosen dan seluruh staf pengajar khususnya di Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.**
- **Teman dan sahabat-sahabatku semua, terimakasih karena kalian telah hadir dalam hidupku**
- **Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.**

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العا لمين وبه نستعين على امورالدنيا والدين والصّلاة والسّلام على اشرف الانبيا ء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد

Puji syukur al-hamdulillah kepada Allah SWT karena atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Segala upaya dan doa untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penulis lakukan, namun karena keterbatasan yang dimiliki penulis tentunya akan dijumpai kekurangan, baik dari segi penulisanya maupun bobot ilmiahnya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. M. Nur, S. Ag., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Siyasah
3. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah dengan tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.

4. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dosen Pebimbing Akademik.
5. Semua Staff dan Dosen khususnya Jurusan Siyasah yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah memberikan ilmunya dan membimbing penulis dari awal jadi mahasiswa sampai sekarang ini.
6. Ayah dan ibu yang selalu memberikan doa, semangat serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai dengan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat Siyasah khususnya angkatan 2011 yang telah bersama-sama melewati suka-duka selama ini di Yogyakarta.
8. Sahabat-sahabat alumni MA.WI. yang selalu ada disaat suka dan duka.
9. Sahabat-sahabat KKN KP/83 2014.
10. Sahabat dan teman kos wisma kalingga R-25.

Selain itu penyusun juga meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak tersebut karena hanya ucapan terima kasih dan doa yang mampu penyusun berikan. Semoga segala kebaikan kalian menjadi ibadah yang akan di balas oleh Allah SWT dengan balasan yang setimpal. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun menjadi bekal ilmu yang bermanfaat. Akhir kata, penyusun ucapkan semoga karya ilmiah ini bisa bermanfaat untuk kita semua khususnya bagi penyusun pribadi dan bisa menjadi sebuah motivasi tersendiri untuk penyusun dalam menggapai cita-cita dalam kehidupan, *amin ya robbal ‘alamin*.

Yogyakarta, 22 September 2015

Penyusun

Fissilmi Kaffah

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

SURAT PERNYATAAN ii

SURAT PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN v

HALAMAN MOTTO x

HALAMAN PERSEMBAHAN xi

KATA PENGANTAR xii

DAFTAR ISI xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 6

D. Telaah Pustaka 7

E. Kerangka Teoritik 9

F. Metode Penelitian 12

G. Sistematika Pembahasan 14

BAB II PRINSIP KEADILAN DAN MASLAHAT DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN

A. Prinsip Keadilan dalam Siyasah Syar'iyah 15

1) Prinsip Keadilan dalam Islam 16

2) Kebijakan dalam Siyasah Syar'iyah 19

B. Prinsip Kemaslahatan 21

C. Keadilan dalam Menentukan Kebijakan Publik 24

1) Pengertian Kebijakan Publik 25

2) Bentuk Kebijakan Publik 27

3) Implikasi Konsep Kebijakan Publik 28

4) Tahap-tahap Kebijakan 29

D. Nilai-nilai dalam Kebijakan 31

BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAMPENGALIHAN DAN SUBSIDI

A. Masalah Sosial-Politik Dalam Subsidi BBM di Indonesia 32

1) Sejarah Subsidi BBM 32

2) Latar Belakang Kebijakan 35

B. Formulasi Kebijakan Energi di Indonesia 36

1) Regulasi Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia 36

a) Undang-undang Dasar 1945 37

b) Undang-undang Tentang Migas 38

C. Legitimasi Kebijakan 39

1) Subsidi Sebagai Komoditas Politik 39

D. Implementasi Kebijakan Subsidi BBM 44

1) Tujuan Kebijakan 44

2) Dampak Kebijakan 49

a) Dampak Positif 49

b) Dampak Negatif 51

3) Transparansi dalam Kebijakan 54

BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN PENGALIHAN SUBSIDI BBM PRESIDEN JOKO WIDODO PERSPEKTIF SIYASAH

A. Kebijakan Pengalihan Subsidi Perspektif Siyasah..... 57

B. Evaluasi Kebijakan 62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 66

B. Saran-saran..... 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN TERJEMAHAN

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mendapat anugerah sebagai negara kaya akan sumber daya alamnya. Sebagai contoh, pada tahun 2012, Indonesia mampu memproduksi minyak bumi sebesar 314.666 barel per hari, sedang pada tahun 2013 Indonesia mampu memproduksi minyak bumi sebesar 825.000 barel per hari dan 794.000 barel per hari di tahun 2014. Gas bumi (tahun 2012) sebesar 3.174.639 MMBTU (british thermal unit) atau sekitar 8698 MMSCFD (Milion Standar Cubic Feat Per Day), produksi per tahun di Indonesia mencapai 2,67 TSCF (trilion square cubic feet) itu berarti Indonesia memiliki cadangan gas bumi selama 59 tahun. Sedangkan hasil pengolahan minyak (BBM) di Indonesia pada tahun 2011 mencapai 240.305.281 barel. LNG sebanyak 21.971.546,61 M.ton, LPG sebanyak 2.285.438.94, minyak mentah (non BBM) sebanyak 102,517,722.[1] Belum lagi ditambah dari sektor-sektor kekayaan sumber daya alam yang lain seperti hutan, laut dan pertambangan.

Namun demikian produksi minyak Indonesia masih kalah jauh jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Berikut beberapa negara dengan penghasil minyak terbesar di dunia. Diposisi *pertama* ada Amerika Serikat, negara adidaya ini menduduki peringkat pertama sebagai negara penghasil minyak terbesar di dunia dengan 12,4 juta barel per hari. Produksi minyak AS

[1]http://www.esdm.go.id/statistik/datasektoresdm.html. Akses 15/04/2015.

selalu mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Saudi Arabia negara yang menjadi tempat tinggalnya raja minyak ini masuk dalam daftar negara penghasil minyak terbesar di dunia. *Kedua* ada Saudi Arabia berhasil mencatat produksi minyak sebesar 11,6 juta barel per hari. *Ketiga* Rusia negara ini berhasil memproduksi minyak sebanyak 10,6 juta barel per hari. Tidak hanya sebagai produsen minyak, negara ini juga dikenal sebagai penghasil gas alam terbesar kedua di dunia. *Keempat* ada China juga sebagai negara penghasil minyak terbesar di dunia. Negeri Tirai Bambu ini berhasil memproduksi 4,4 juta barel minyak per hari. Selanjutnya diposisi *kelima* negara di kawasan Timur Tengah seperti Iran adalah negara yang sering berkonflik dengan negara lain karena kekayaan minyak bumi yang dimilikinya. Produksi minyak bumi Iran per hari mencapai 3,4 juta barel. Sama halnya dengan Iran, negara di kawasan Timur Tengah lainnya diposisi *keenam* ada Irak juga dikenal sebagai produsen minyak terbesar di dunia. Produksi minyak Irak mencapai 3,3 juta barel per hari.[2]

Dengan hasil dari kekayaan sumber daya alam di atas saja, Indonesia sebenarnya sudah lebih dari cukup dapat membiayai kebutuhan negara tidak perlu berhutang dan tidak perlu memungut pajak dari masyarakat. Akan tetapi, sekalipun Indonesia memiliki sangat banyak kekayaan migas sebagaimana di atas, kenyataannya Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk miskin yang besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)

[2]http://economy.okezone.com//daftar-negara-penghasil-minyak-terbesar-di-dunia. Akses 16-09-2015.

Republik Indonesia pada tahun 2013, masih terdapat 28,7 juta warga miskin.[3] Sedangkan bila diukur berdasarkan kriteria World Bank, maka akan ada 134 juta penduduk miskin di Indonesia (dengan jumlah penduduk Indonesia pada 2013 sebanyak 250 juta jiwa).[4] Selain itu Indonesia juga terlilit utang ribuan triliun, dalam pagu APBN-P 2014 untuk pembayaran cicilan utang (pokok dan bunganya) mencapai Rp 135,5 triliun rupiah.[5]

Dengan kekayaan sumberdaya alam yang melimpah ruah, sungguh sangat ironi jika di negeri ini masih terdapat banyak rakyat miskin, hutang negara menggunung, layanan sosial masyarakat yang buruk, mutu pendidikan yang rendah, kesehatan yang mahal, penyelenggaraan negara yang tidak berpihak terhadap rakyat, dan berbagai fasilitas sosial yang mahal dan tidak layak pakai. Semua itu menunjukkan adanya kelemahan dalam kebijakan pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia, sehingga hasil pengelolaan sumber daya alam tersebut tidak kunjung memberikan maslahat kepada warga negara.

Dalam hal ini, pemerintah sah-sah saja dalam membuat kebijakan karena setiap Presiden memiliki visi dan misi yang berbeda dalam penentuan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Asalkan pembuatan kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat.

---

[3]Badan Pusat Statistik Indonesia. Dapat dilihat di www.BPS.go.id.

[4]http;//www.republika.co.id/berita/nasional/umum/ -penduduk indonesia-diperkirakan 250 juta jiwa. Akses 15/04/2015.

[5]Kemenkeu, *Realisasi APBN Tahun Anggaran 2014*.

Di lihat dari tujuan politik suatu kebijakan publik yang dibuat melalui proses yang benar dengan dukungan teori yang kuat memiliki posisi yang kuat terhadap kritik dari lawan-lawan politik. Kebijakan publik tersebut dapat meyakinkan kepada lawan-lawan politik yang tadinya kurang setuju. Kebijakan publik seperti ini tidak akan mudah dicabut hanya karena alasan kepentingan sesaat dari lawan-lawan politik.[6]

Dalam setiap pembuatan kebijakan selalu ada pihak yang pro dan kontra dalam merespon dan menyikapinya, ada sisi positif dan negatifnya. Seperti kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengurangi subsidi BBM dan penentuan harga BBM yang mengacu pada mekanisme pasar global.

Dari sudut pandang positif mengenai dampak dikuranginya subsidi BBM ini yaitu memungkinkan pemerintah menyelamatkan anggaran APBN karena jika tidak maka kerugian APBN akan membengkak. Untuk meminimalisir penyelundupan BBM ilegal yang masih marak dan juga selama ini masih banyak masyarakat kategori ekonomi menengah ke atas yang menggunakan BBM bersubsidi. Alangkah lebih baik anggaran subsidi BBM ini dialihkan atau paling tidak dikurangi untuk bidang yang lebih penting seperti untuk membiayai program produktif. Misalnya proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan transportasi massal. Disamping itu pemerintah juga harus mulai memikirkan energi alternatif pengganti BBM.

---

[6]AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 5.

Sedangkan sisi negatifnya dampak dari kenaikan harga BBM lebih banyak dirasakan masyarakat terutama kalangan menengah kebawah karena menambah pengeluaran anggaran sehari-hari, karena otomatis berpengaruh terhadap harga-harga kebutuhan pokok dan transportasi. Sedangkan dari sisi sosial pengaruh kenaikan BBM akan memberikan dampak angka kemiskinan yang semakin tinggi.

Jika saja seluruh sumber daya alam yang ada di Indonesia dikelola dengan sistem pengelolaan yang baik dan sesuai konstitusi, tentu hasilnya akan melimpah dan memberikan maslahat kepada warga negara. Oleh karena itu dengan melihat amat sangat melimpah ruahnya kekayaan alam di Indonesia yang telah keliru dalam pengelolaannya sehingga mengakibatkan kenestapaan dan kenistaan hidup maka perlu adanya kebijakan yang memihak kepada warga negara dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai bagian dari solusi jitu atas permasalahan politik kebijakan ekonomi yang ada di Indonesia saat ini.

Secara politis dengan terjadinya kenaikan BBM akan mengakibatkan semakin tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan politisi dalam perebutan kekuasaan di panggung politik dan dikhawatirkan akan semakin maraknya penyelewengan kekuasaan yang terjadi dalam proses politik. Selain itu dampak sosiologis dalam masyarakat adalah menurunnya kepercayaan dan kepuasaan terhadap kebijakan pemerintah.

Dapat dikatakan bahwa pemerintah dalam menetapkan kebijakan tersebut seolah-olah mengabaikan kepentingan rakyat. Dimanakah letak keadilan dan kemaslahatan atas kebijakan kenaikan harga BBM? yang sudah

menjadi keharusan bahwa tugas pemerintah adalah untuk bisa menjaga kestabilan harga BBM untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun ungkapkan diatas, kebijakan pemerintah terhadap pengalihan subsidi BBM ini sangat berpengaruh terhadap berbagai bidang seperti halnya berpengaruh secara politik. Oleh karena itu, penyusun mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan siyasah terhadap kebijakan pemerintah terhadap pengalihan subsidi BBM?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk menjelaskan kebijakan pemerintah mengalihkan subsidi BBM dalam kaitannya dengan politik pemerintahan.
   b. Untuk menjelaskan dan menganalisis kajian siyasah terhadap kebijakan pemerintah mengalihkan subsidi dan menetapkan harga BBM mengacu pada mekanisme pasar.
   c. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi prinsip keadilan dan kemaslahan dalam pengalihan subsidi dan penetapan harga BBM.

2. Manfaat Penelitian

Secara akademis, memberikan sumbangsih khazanah keilmuan dalam bidang siyasah khususnya dalam masalah kebijakan yang dibuat harus adil.

a. Memberikan masukan dan sebagai pertimbangan pemerintah dalam membuat dan menyusun kebijakan selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelaahan yang telah penyusun lakukan terhadap bahan-bahan kepustakaan yang tersedia baik melalui buku-buku maupun literatur yang lain menyangkut dengan kebijakan dan prosesnya. Tujuan dari kebijakan itu adalah untuk keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Ada beberapa karya tulis ilmiah yang membahas mengenai kebijakan kenaikan harga BBM, tetapi belum ada yang spesifik membahas mengenai hubungan kebijakan ini dengan politik (*siyasah*).

Buku karya Refrisond Baswir yang berjudul *Mengapa Masyarakat (perlu) Menolak Kenaikan Harga BBM* , Yogyakarta, PUSTEP UGM, 2005. Di dalamnya menuliskan bahwa kebijakan mengenai harga bahan bakar minyak yang terkait penghapusan subsidi, kebijakan ini tidaklah berdiri sendiri yang diterapkan oleh pemerintah akan tetapi berkaitan dengan liberalisme ekonomi yang sedang berlangsung di Indonesia dan memberikan peluang insentif bagi investor pertambangan lokal/asing untuk menanamkan

modalnya di Indonesia. Dengan landasan adanya Undang-undang minyak dan gas No. 22 tahun 2005.[7]

Artikel yang ditulis dalam "*Jurnal Bisnis dan Ekonomi Politik,* Arum Widodo menuliskan artikel tentang "Kebijakan Penghapusan Subsidi BBM", bahwa hal itu pasti akan menambah kesengsaraan masyarakat Indonesia yang dalam beberapa tahun ini masih dalam taraf pemulihan dan pengembangan ekonomi. Penghapusan subsidi ini meskipun akan membawa dampak yang berat pada masyarakat, tetapi juga akan membawa dampak positif yang lebih besar, dengan diterapkannya harga jual BBM dengan harga jual impor, penyelundupan secara otomatis akan berhenti dengan sendiri.[8]

Buku karya Budi Winarno *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Yogyakarta, MedPress, 2008 didalamnya menjelaskan tentang beberapa konsep, teori, dan model dalam kebijakan publik, juga dapat membantu dan memahami bagaimana mendeskripsikan, menjelaskan, dan menganalisis proses perumusan dan pembentukan kebijakan publik, implementasi kebijakan, dampak, evaluasi, perubahan, dan terminasi kebijakan publik.[9]

Skripsi Muhammad Fadhil Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah dan Hukum yang berjudul "*Kebijakan Pemerintah Terhadap Penetapan Harga BBM Tahun 2005 Ditinjau Dari Etika Hukum Islam* . Skripsi ini didalamnya membahas mengenai kebijakan pemerintah terhadap kenaikan harga BBM tersebut melampaui batas nilai kewajaran sehingga banyak ditentang oleh

---

[7]Refrisond Baswir, *Mengapa Masyarakat (perlu) Menolak Kenaikan Harga BBM*, (Yogyakarta: PUSTEP UGM, 2005).

[8]Arum Widodo, *Kebijakan Penghapusan Subsidi Bahan Bakar Minyak,* hlm. 32.

[9]Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, (Yogyakarta: MedPres, 2008).

rakyat. Kebjakan ini berkaitan dengan liberalisasi ekonomi yang pada saat itu berlangsung ditinjau dari hukum Islam.

E. Kerangka Teori

Melihat dampak dari permasalahan sosial-politik yang diakibatkan dari kebijakan pemerintah mengenai pengalihan subsidi dan penentuan harga BBM mengacu pada mekanisme pasar, maka penyusun akan menggunakan teori siyasah syar'iyah. Secara sederhana siyasah syar'iyah diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syari'at.[10]

Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masalah umum umat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.[11]

Definisi diatas kemudian dipertegas lagi oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan siyasah syar'iyah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syari'at dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya

---

[10]Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 5.

[11]Abdul Wahhab Khalaf, *Al Siyasah al Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), hlm. 15.

tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh al Qur'an maupun as Sunnah.[12]

Dalam fiqih juga disebutkan penetapan harga harus diserahkan pada mekanisme pasar. Harga harus dibiarkan naik turun secara alami tanpa rekayasa yang merugikan dalam perputaran ekonomi (semua pihak). Sebagai misal pada zaman Rasulullah, harga barang-barang di Madinah membumbung tinggi, umat Islam meminta Rasulullah untuk mengintervensi menentukan harga (*tas'ir*), namun Rasulullah menolaknya.[13] Kemudian dalam kaidah Ushul Fiqih.

تصرف اللإ ما م على ا لراعية منوط با لمصلحة[14]

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa setiap tindakan atau kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan, sebab pemimpin adalah pengemban amanat penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia sebagai petunjuk dalam kehidupan mereka serta harus memperhatikan kemaslahatannya.[15]

---

[12]Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah……*, hlm. 5

[13]Abdul Jalil dkk, *Fiqih Rakyat (Pertautan Fiqih dan Kekuasaan),* (Yogyakarta: LkiS, 2000), hlm. 99.

[14]Al Imam Jalaludin Abdurrhman al Suyuti, *al Asybah wa al Nazair fi Qawaid wa Furu' Fiqhi al Syafi'i.* (Beirut: Dar al Fikr al Ilmiah, 1990), hlm. 121.

[15]Imam Musbikin, *Qawaid al Fiqhiyah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 124.

Di dalam penjelasan kaidah ini juga, pada dasarnya seorang penguasa merupakan wakil dari rakyat untuk menyelenggarakan beberapa kebijakan, diantaranya adalah:

1. Menegakkan keadilan
2. Menghindari kedzaliman
3. Menjaga hak dan akhlak masyarakat
4. Memelihara keamanan
5. Menyebarkan ilmu penngetahuan
6. Meningkatkan fasilitas umum

Setiap tindakan atau kebijakan dari penguasa yang bertentangan dengan kemaslahatan ini, maka hal tersebut akan menyebabkan kemadzorotan dan keputusan pemerintah dianggap tidak benar (tidak sah).[16]

Dalam UUD 1945 Pasal 33:(3) disebutkan bahwa "Bumi, air dan kekayaan sumber daya alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat".[17]

Dilihat dari segi kebijakannya penyusun juga akan menggunakan teori dari James Anderson, menurutnya kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.[18] Sedangkan Thomas Dye berpendapat lain tentang definisi kebijakan publik. Menurutnya,

---

[16]Mustofa Ahmad Azzarqo, *al-Madkhal Fi al Fiqhi al-'amm*, cet. Ke-2, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 1050.

[17]Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).

[18]James Anderson, *Public Policy Making*, (New York: Holt,1969), hlm. 4.

kebijakan publik merupakan segala pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sehingga sikap pemerintah untuk tidak menanggapi suatu permasalahan publik tergolong dalam sebuah kebijakan pemerintah yang mempunyai pengaruh terhadap publik.[19]

Dari kesimpulan pendapat James Anderson dan Thomas Dye mempunyai tiga kata kunci dalam sebuah kebijakan publik, yaitu:

1. Kebijakan publik berisi bertujuan, nilai-nilai, dan praktek/pelaksanaannya.
2. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta.
3. Kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Di dalam prosesnya kebijakan publik, pemerintah berperan sebagai pengarah dan lembaga administrasi yang mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan kebijakan demi mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan yang menyeluruh. Pemerintah harus mampu merangkul pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan sebuah kebijakan, sehingga kebijakan yang telah diterapkan tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka yaitu penelitian dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan dan menjadikan

[19]AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 2.

data-data yang diperoleh dari berbagai sumber (artikel maupun opini) tentang kebijakan energi pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk dideskripsikan dan dikaji secara mendetail dari tinjauan siyasah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. yaitu riset terhadap masalah yang diselidiki untuk memberikan penilaian terhadap masalah yang diselidiki dengan ukuran-ukuran dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.[20] Kemudian dianalisis kebijakan pengalihan subsidi BBM tersebut dengan pandangan siyasah.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif.* Pendekatan yuridis digunakan untuk melihat obyek hukum karena menyangkut dengan peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lain yang berlaku. Sedangkan pendekatan normatif untuk melihat dan memahami kebijakan energi pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan menggunakan prinsip-prinsip, asas-asas atau kaidah-kaidah yang ada dalam fiqih siyasah dan kebijakan publik.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan penyusun terdiri dari berbagai sumber diantaranya dari situs Instansi Pemerintahan, instansi-instansi lain yang terkait, buku-buku yang membahas mengenai kebijakan

[20]Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 787.

politik-energi, artikel-artikel (baik yang ada di internet maupun surat kabar), jurnal dan data-data lain yang berkaitan.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif dan deduktif. Induksi merupakan analisis data dari kebijakan energi (mengalihkan anggaran subsidi dan menetapkan harga BBM sesuai mekanisme pasar) pemerintahan Presiden Joko Widodo, untuk menentukan kesimpulan umum dan deduksi merupakan analisis berdasarkan kaidah-kaidah atau asas fiqih siyasah untuk menilai perilaku politik yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan pemerintah dalam hal energi (mengalihkan subsidi dan menetapkan harga BBM sesuai mekanisme pasar) ditinjau dari perspektif siyasah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran penulisan skripsi yang sistematis, maka penyusun membagi skripsi ini ke dalam lima bab, yang secara lengkap dapat penyusun gambarkan sebagai berikut:

Bab satu, yaitu pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi tentang prinsip keadilan dan maslahat dalam pembuatan kebijakan dari sudut pandang fiqih siyasah dan kebijakan publik.

Bab tiga, menguraikan data-data berisi menegnai kebijakan pemerintah dalam pengalihan subsidi BBM, masalah sosial-politik, formulasi kebijakan, legitimasi kebijakan dan implementasinya.

Bab empat, berisi analisis mengenai kebijakan Presiden Joko Widodo terhadap pengalihan subsidi BBM dalam perspektif siyasah.

Bab lima, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan serta saran-saran dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejatinya Indonesia merupakan sebuah negara yang sejak awal kemerdekaannya, mencita-citakan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Hal ini tidak dapat dipungkiri seperti yang tertuang dalam konstitusi (UUD 1945) dan juga harapan dari para *founding father* bangsa. Sebagai contoh tertuang dalam kalimat pada alinea keempat pembukaan UUD 1945:"....*melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa...*" begitu juga yang terdapat dalam pasal-pasalnya. Seperti Pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; pasal 31 yang menjamin hak tiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 33 yang dengan tegas mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat; dan pasal 34 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Hal yang penting dilakukan oleh masyarakat saat ini adalah

1. Memastikan apakah realokasi anggaran subsidi BBM kepada sektor-sektor produktif sungguh-sungguh dilakukan pemerintah secara efektif atau tidak. Di sisi lain, solusi jangka panjang yang harus diambil oleh pemerintah ialah mengubah kebijakan pengelolaan migas menjadi mandiri dengan membangun infrastruktur dan SDM yang memadai.

2. Pengelolaan harga BBM tidak boleh mengikuti harga pasar karena Indonesia tidak menganut pasar bebas dalam menentukan harga BBM. Putusan MK No.002/PUU-1/2003 tanggal 21 Desember 2004 telah mencabut penetapan harga pasar pada minyak dan gas bumi. Putusan tersebut menjadi hasil dari uji materi pasal 28 ayat 2 UU No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Pasal tersebut menyatakan, “harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar, “pasal itu pun dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun demikian, pemerintah masih tetap sebagai pihak yang menentukan harga BBM sesuai undang-undang. Dalam APBN 2014, patokan harga BBM ditentukan sebesar 105 Dollar AS. Penentuan harga oleh pemerintah ini dalam rangka memenuhi mandat UUD.

Tidak bisa dipungkiri pembuatan kebijakan publik adalah sebuah proses politik yang melibatkan berbagai kepentingan dan sumber daya sehingga akhir dari proses politik tersebut adalah produk subyektif yang diciptakan oleh pilihan-pilihan sadar dari pelaku kebijakan. Untuk itu pemahaman tentang makna kebijakan publik menyangkut ruang lingkup, tahapan dan model-modelnya menjadi penting dilakukan dalam rangka membangun demokrasi.

Sebagai proses politik, pembuatan kebijakan tidak pernah sepi dari perdebatan (pro dan kontra). Ada keterkaitan yang cukup dekat antara kebijakan publik dengan politik. Bagaimanapun kebijakan publik lahir dari

dunia politik yang melibatkan proses yang komplet gagasan dapat datang dari berbagai sumber, seperti kepentingan para politisi, lembaga-lembaga pemerintah, kelompok-kelompok kepentingan, dan warga negara. Memahami kebijakan publik harus dipahami sebagai tujuan karena kebijakan publik adalah alat untuk mencapai sebuah tujuan. Artinya, kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Karena kebijakan publik merupakan bentuk paling nyata sistem politik yang dipilih. Politik demokratis memberikan hasil kebijakan publik yang berproses secara demokratis dan dibangun untuk kepentingan kehidupan bersama, bukan orang-orang satu atau beberapa golongan saja.

Harus ada transparansi anggaran subsidi BBM agar tidak ada celah penyimpangan korupsi yang dimanfaatkan pihak tertentu khususnya bagi mereka yang memiliki relasi politik.

Kesimpulan dari pengalihan subsidi BBM ini adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi politik kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal ini mengalihkan subsidi BBM sah-sah saja dilakukan selama tidak bertentangan dengan konstitusi. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk upaya Presiden Joko Widodo merealisasikan program-program dalam janji kampanyenya. Untuk mewujudkan program-program tersebut tentu membutuhkan anggaran, maka diambilah kebijakan pengurangan subsidi ini atau dalam bahasa lain pengalihan anggaran subsidi.

Kebijakan ini juga pernah dilakukan oleh para Presiden sebelumnya, jadi bukan sesuatu yang baru. Permasalahan BBM memang menjadi isu yang sensitif karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Tidak jarang digunakan oleh para politisi sebagai alat politik untuk pencitraan dan sebagai komoditas politik menjelang pemilihan umum.

2. Ditinjau dari perspektif siyasah kebijakan penghapusan subsidi BBM ini boleh saja dilakukan selama bertujuan untuk kemaslahatan yang lebih besar dan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Apalagi pengalihan anggaran subsidi ini adalah untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan program-program pemberdayaan masyarakat sejahtera.

   Kebijakan ini merupakan jalan untuk menghadirkan anggaran belanja yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kemudian, persepsi dan upaya solutif terhadap Energi Sumber Daya Mineral yang sangat erat kaitannya dengan Subsidi BBM yaitu Indonesia seharusnya lebih mandiri dalam mengelola kekayaan negara sehingga mengurangi kebocoran, dan mengedepankan konstitusi untuk menunjang kesejahteraan Rakyat Indonesia, bukan dengan membuat aturan untuk menggugurkannya dan/atau mencari celah untuk mendapatkan keuntungan pribadi/golongan.

Disatu sisi awalnya akan memberatkan masyarakat, namun jika kebijakan ini benar-benar dilaksanakan dengan benar dan transparan dalam

jangka panjang akan merasakan dampak yang lebih baik bagi rakyat, bangsa dan negara.

B. Saran-saran:

1. Rancangan dan pelaksanaan program pengalihan subsidi perlu didasarkan pada fakta dan analisis sistematis menyeluruh multi aspek.
2. Aliran dana pemerintah untuk penglihan subsidi energi perlu diinformasikan secara terbuka (Transparan). Agar masyarakat mengetahui realokasi anggaran subsidi BBM diperuntukkan sebagaimana mestinya yaitu untuk kesejahteraan rakyat.
3. Kebijakan energi untuk kedepannya harus dikelola dengan baik karena menyangkut hajat hidup rakyat dan berpengaruh sebagai ketahanan nasional dalam hal ini meliputi ketahanan politik, ekonomi, sosial dan budaya.
4. Idealnya cara yang paling efektif untuk mengurangi subsdi BBM ini yaitu melalui instrumen harga. Pemerintah juga harus punya konsep yang ideal untuk mendukung setelah instrumen harga itu diterapkan. Efek sosial ekonomi untuk masyarakat menengah kebawah juga harus diproteksi.

DAFTAR PUSTAKA

1) Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, al-Qur'an dan Terjemahnya

2) Fiqih/Ushul Fiqih

Abdurrahman al Suyuti, Al Imam Jalaludin, *al Asybah wa al Nazair fi Qawaid wa Furu' Fiqhi al Syafi'i,* Beirut: Dar al Fikr al Ilmiah, 1990

Al-Rasyuni, Ahmad dan Jamal Barut, Muhammad, *Ijtihad Antara Teks, Realita, dan Kemaslahatan Sosial,* alih bahasa Ibnu Rusydi dan Hayyin Muhdzar, Jakarta: Erlangga, 2002

Azzarqo, Mustofa Ahmad, *al-Madkhal Fi al-Fiqhi al-'amm,* cet. Ke-2, Damaskus: Dar al-Fikr, 1998

Djazuli, A, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah,* Jakarta: Kencana, 2009

Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah:Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001

Jalil, Abdul dkk, *Fiqih Rakyat (Pertautan Fiqih dan Kekuasaan),* Yogyakarta: LkiS, 2000

Khallaf, Abdul Wahhab, *Al Siyasah al Syari'ah,* Kairo: Dar al-Anshar, 1977.

Khallaf, Abdul Wahhab (terj.Zainudin Adnan), *Politik Hukum Islam,* Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994

Muhammad, Shuheri, *Studi Siyasah dan Sumbangan terhadap Pembangunan Masyarakat dan Negara,* Ponorogo: ISID Gontor, 2008

Musbikin, Imam, *Qawaid al Fiqhiyah,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000

Qutub, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam,* alih bahasa Afif Muhammad, Bandung: Pustaka Firdaus,1994

Shalih al-Utsaimin, Muhammad bin, *Politik Islam penjelasan Kitab Siyasah Syar'iyyah Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Ajmal Arif, Jakarta: Griya Ilmu, 2014

3) Lain-lain

Ali, Attabik dan Muhdlor, Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum PP Krapyak Yogyakarta, 1996

Anderson, James, *Public Policy Making,* New York: Holt,1969

Baswir, Refrisond, *Mengapa Masyarakat (perlu) Menolak Kenaikan Harga BBM*, Yogyakarta: PUSTEP UGM, 2005

Budiarto, Rachmawan, *Kebijakan Energi: Menuju Sistem Energi yang Berkelanjutan,* Yogyakarta: Samudra Biru, 2011

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* cet. II, Jakarta: Bali Pustaka, 1996

Dun, William, *Analisa Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1999

Easton, David, *Kerangka Kerja Analisis Sistem Politik,* Jakarta: Bina Aksa, 1984

Eyestone, Robert, *The Tread of Policy: A Study In Policy Leadership,* Indianapolis: Bobbs-Merril, 1971

Hasby ash-Shiddieqy, Muhammad Teuku, *al-Islam,* Semarang: Pustaka Rizki Putra, cet. Kedua, 1998

Lindblom, Charles, *Proses Penetapan Kebijakan Publik.* Edisi kedua. Penerjemah Ardian Syamsudin. Jakarta: Airlangga, 1986

Munawir, Ahmad Warson, *al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia,* Yogyakarta: PP. al-Munawir, 1984

Nugroho, Riant, *Public Policy,* Jakarta: Elek Media Komputindo, 2009

Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam,* Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995

Salim, M. Arsakal, *Etika Intervensi Negara,* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998

Subarsono, AG., *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah dan UUD 1945,* Jakarta: UI Press, 1995

Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999

Winarno, Budi, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Yogyakarta: MedPres, 2008

Ade Wahyudi,http://koran.tempo.co//BBM-sebagai-Komoditas-Politik

Apa kata Faisal Basri soal Petral? http://bisniskeuangan.kompas.com

Arum Widodo, *Kebijakan Penghapusan Subsidi Bahan Bakar Minyak*

Badan Pusat Statistik Indonesia. Dapat dilihat di www.BPS.go.id

Erick Hansnata, *Era Baru Subsidi*, KOMPAS, 07/01/2015

http://economy.okezone.com//daftar-negara-penghasil-minyak-terbesar-di-dunia

http://www.selasar.com/ekonomi/penentuan-harga-bbm-bersubsidi

http://www.esdm.go.id/statistik/datasektoresdm.htmlatauhttp://www. migas.esdm.go.id/tentang peta dan data

http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/_bbm_normalisasi_pasokan

http://finance.detik.com//keberanian-jokowi-terapkan-kebijakan-radikal-subsidi-bbm

http://www.kompasiana.com/alexandersirait/penaikan-bbm-boleh-dikatakan-strategi-cerdik-jokowi-untuk-buka-ruang-fiskal-yang-lebih-besar-lagi.

http;//www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/07/17/2013penduduk indonesia-diperkirakan 250 juta jiwa

http://nasional.kompas.com//Jokowi.Tetapkan.Harga.Premium.Rp.8.500.dan.Solar Rp.7.500

Kemenkeu, *Realisasi APBN Tahun Anggaran 2014*

KOMPAS 24-01-2015, *DPR Inginkan Penjelasan Pemerintah*

KOMPAS, 24-01-2015, *"Kepercayaan Publik Masih Terjaga"*

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Dikutip dari artikel karya Bawono Kumoro (Peneliti Politik The Habibie Center) berjudul "Subsidi BBM Sebagai Komoditas Politik

Marwan batubara," *Jangan Cabut Subsidi BBM"*, Republika, 10 Januari 2015

Ndiame Diop, “Why is Reducing Energy Subsidies a Prudent, Fair, and Transformative Policy for Indonesia?” *Economic Premise*, World Bank, Number 136, March 2014

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3)

Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang migas

LAMPIRAN

A. DAFTAR TERJEMAHAN

No	Bab	Halaman	Q.S. dan Ayat	Terjemahan
1	II	16	Q.S. al-Hadid: 25	Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka alkitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan

CURRICULUM VITAE

Nama : Fissilmi Kaffah

TTL : Banyumas, 24 Mei 1992

CP : 085726366759

Bapak : H. Marwan Marghani

Ibu : Siti Aisiyah

Alamat asal : Kebarongan Rt 01/Rw 13, Kemranjen, Banyumas, Jawa Tengah

Alamat Jogja : Ambarukmo Rt 11/Rw 04 Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta

Riwayat Pendidikan :

1. MI.WI Kebarongan (1998-2004)
2. MTS.WI Kebarongan (2004-2007)
3. MA.WI Kebarongan (2007-2010)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011-2015)

Pengalaman Organisasi :

1. OSIS (2007-2009)
2. Palang Merah Remaja Kab. Banyumas (2004-2009)
3. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) (2012-2013)
4. Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Siyasah (2013-2014)